



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK HARI CAHYONO
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. PASAR MINGGU
3. NHK : 871767

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.090.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m ² /80 m ² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /60 m ² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 68 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	368.500.000
1. MOTOR, SUZUKI 4 TAG Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
4. MOTOR, BENELLI BENELLI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
5. MOBIL, HYUNDAI Creta Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total****Rp.** **----****III. HUTANG****Rp.** **200.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp.** **1.268.500.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.